

Get Free Analisis Ekonomi Kelautan Dan Arah Kebijakan Pengembangan Read Pdf Free

Menaksir Gerak dan Arah Pembangunan Indonesia Timur Metode Penelitian Kelautan dan Perikanan Pengembangan Perikanan, Kelautan dan Maritim untuk Kesejahteraan Rakyat Volume I Pemanfaatan dan Pengembangan Kelimpahan Sumber Daya Kelautan Indonesia Secara Berkelanjutan ENSIKLOPEDIA KELAUTAN DAN PERIKANAN Conserving Biocultural Landscapes in Malaysia and Indonesia for Sustainable Development Pengembangan Perikanan, Kelautan, dan Maritim untuk Kesejahteraan Rakyat Volume II Perlindungan Pesisir Teknologi Pengembangan Perikanan dan Kelautan untuk Memperkuat Ketahanan Pangan serta Memacu Perekonomian Nasional secara Berkelanjutan Jurnal kelautan nasional Hukum Lingkungan Indonesia Pembangunan Perekonomian Maluku Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Hutan: Perspektif, Kebijakan, dan Aksi Dharmasena Manajemen Agribisnis Perikanan Peran Kearifan Lokal Dan Modal Sosial Dalam Pengurangan Risiko Bencana Dan Pembangunan Pesisir Evidence-Based Policy: dari Riset ke Kebijakan Volume II Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan Gender dan Kemiskinan di Indonesia Ekonomi Pembangunan Pertanian Integrated Coastal Management: Kajian Hukum untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan di Indonesia Menyibak Gelombang Menuju Negara Maritim Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pengantar Wisata Bahari Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Indonesia Ocean Observing System Dinamika Dan Rekonstruksi Kebijakan Publik Di Era Otonomi Daerah Kumpulan Kajian Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Wilayah Pesisir Indonesia Pemberdayaan Nelayan Tradisional: Analisis Kemiskinan Nelayan Tradisional Desa Percut IPTEK kelautan dan perikanan Indonesia kurun 2001-2006 Wawasan, Tantangan, dan Peluang Agrotechnopreneur Indonesia Aspek nasional dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia MERDEKA BELAJAR Promoting Coastal Areas and Small Islands Platform Perikanan Nasional untuk Mencapai SDG ' s 14 Analisis Daya Saing Provinsi dan Wilayah Menggugat Negara Maritim Konflik Kebijakan Di Wilayah Perbatasan Membangun Laut Membangun Manusia Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional Coral Governance

Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa wilayah pesisir Indonesia memiliki nilai strategis dengan berbagai keunggulannya dari segi fisik, geografis, dan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Potensi wilayah pesisir tersebut berpengaruh terhadap peningkatan pemanfaatan sumber daya alam, jumlah penduduk di wilayah pesisir, dan pemanfaatan lain yang diperlukan bagi pembangunan. Sumber daya alam di wilayah pesisir sangat penting bagi perekonomian dan pembangunan yang nantinya harus dikelola secara terpadu dan berkelanjutan. Topik ini didasari oleh esensi kesetimbangan kuantitas dan kualitas interfase lautan dan daratan. Zona interfase itu dikenal sebagai pesisir, di mana perlindungannya menjadi wajib untuk maksud pengendalian kuantitas aktivitas daratan guna mencegah pencemaran laut, dan sebaliknya pengendalian kuantitas lautan, misalnya banjir rob, guna meminimalkan dampaknya bagi daratan. Maksud itu menandai keunikan buku ini, yaitu perlindungan pesisir dengan pendekatan teknik melalui pengendalian pencemaran dan remediasi. Tujuan dari perlindungan pesisir, secara normal adalah untuk keberlanjutan aktivitas kehidupan di dua fase tersebut. Secara khusus adalah menyiapkan teknik remediasi

ketika kejadian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan disebabkan peristiwa alam yang tidak terhindarkan. Topik ini menyediakan pengetahuan terkait dinamika fisik, kimia, dan biologi antara lautan dan daratan. Penyebab pencemaran dan cara pengendaliannya dengan metode baku mutu dan ekologi, ekoteknologi, pengendalian dampak negatif pencemar terhadap makhluk hidup, dan fitoteknologi. Selain fitoremediasi, remediasi fisik dan kimia dipersiapkan, dengan kelengkapan sistem pemantauannya. Zona riparian ditonjolkan sebagai penyangga dinamika ekosistem daratan dan lautan, dan dalam kerangka merespons perubahan iklim dalam jangka panjang. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dalam usaha menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu teori atau pengetahuan. Buku ini menguraikan tahap-tahap dalam penelitian yang menekankan pada prinsip dasar penelitian, pengambilan sampel, analisis, dan interpretasi data. Untuk mempermudah pemahaman serta menambah wawasan pembaca, buku ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh dan studi kasus, antara lain yaitu pendugaan stok sumber daya ikan, pencemaran laut, mikroplastik di perairan, terumbu karang, perubahan garis pantai, gelombang, mangrove, foraminifera, dan tsunami. Pembahasan pada buku ini diawali dengan penjelasan tentang konsep dasar kebenaran ilmiah sebagai landasan dalam memahami esensi suatu penelitian. Selanjutnya diuraikan tentang jenis-jenis penelitian, strategi pemilihan topik penelitian dengan menggunakan konsep mind mapping. Metode penelitian diungkapkan dalam bentuk penjelasan tentang cara merumuskan hipotesis penelitian, metode pengambilan data, dan juga metode analisis data. Kemudian diuraikan juga secara komprehensif cara penyajian dan interpretasi data yang meliputi penjelasan tentang jenis-jenis grafik dan tabel yang dapat digunakan untuk menyampaikan data hasil penelitian. Secara keseluruhan, buku ini sangat tepat dijadikan acuan atau pedoman bagi para peneliti di bidang kelautan dan perikanan. Buku ini menjelaskan tentang Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan negara maritim dengan jumlah pulau mencapai kurang lebih 17.504 pulau, laut yang sangat luas yaitu mencapai 2/3 luas wilayah negara, garis panjang pantai terbesar ke-2 di dunia mencapai 95.181 km, dan letaknya sangat strategis berada di antara dua benua dan dua samudra. Di Indonesia, berbagai konsep nomenklatur kewilayahan seperti 'wilayah', 'kawasan', 'daerah', 'regional', 'area', 'ruang' dan istilah-istilah sejenis, banyak dipergunakan dan saling dapat di pertukarkan pengertiannya walaupun masing-masing memiliki bobot penekanan pemahaman yang berbeda-beda. Secara teoritik, tidak ada perbedaan nomenklatur antara istilah wilayah, kawasan dan daerah. Semuanya secara umum dapat diistilahkan dengan wilayah (region). Buku ini mencoba mengisi kekosongan -kekosongan bacaan di bidang keilmuan yang terkait dengan kajian perencanaan dan pengembangan wilayah. Domain bahasan buku ini tidak sekedar membahas teori-teori yang dikembangkan bidang ilmu kewilayahan (Regional Science), melainkan juga membahas bidang-bidang ilmu lain yang terkait dan sangat penting untuk menjawab kompleksitas permasalahan pembangunan wilayah di Negara-negara berkembang, terutama di Indonesia, seperti kritik-kritik atas teori-teori pembangunan yang dikembangkan di dunia barat, teori-teori perencanaan dan aspek-aspek kelembagaan hingga masalah-masalah local community development, social capital, hingga ke common property dalam kaitannya dengan perencanaan makro, regional dan lokal. Buku ini secara terstruktur menyetengahkan kiat-kiat pembelajaran agrotechnopreneurship, wawasan bisnis global, belajar dari contoh keberhasilan para agrotechnopreneur ASEAN yang terkenal, serta berbagai tantangan, sekaligus peluang bisnis di Indonesia untuk memasok pasar domestik, sekaligus pasar global yang potensial. This book presents perspective on the importance of natural and cultural

relationships for conserving bio-cultural landscapes. It explores the approaches and concepts used to conserve bio-cultural landscapes in Malaysia and Indonesia. The book highlights the importance of bio-cultural landscape in sustainable development framework and its link to sustainable development goals are also included. It fills the gap in literature with special focus on this region. The book is of interest to teachers, researchers, climate change scientists, conservationists, capacity builders and policymakers. Also it serves as additional reading material for undergraduate and graduate students of ecology, and environmental sciences. National and international environmental scientists, policy makers also find this to be a useful read.

Gender dan Kemiskinan menjadi pilihan judul buku ini yang berhasil dihimpun dari hasil penelitian di beberapa tempat yang tersebar di Jawa, Sumatera, Maluku, dan NTT. Isu gender dan kemiskinan menjelaskan bagaimana kemiskinan mengalami proses reproduksi dan memberikan dampak serta memunculkan fenomena spesifik pada kaum perempuan. Perempuan sebagai perilaku ekonomi dan penerima dampak pembangunan yang memunculkan kemiskinan. Buku ini dengan berani mengambil judul Dinamika dan Rekonstruksi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah, Perspektif Ekonomi, Politik, Sosial, dan Budaya. Sebagaimana judul dari sebuah buku, ia berada pada posisi menyatakan atau mempercayai sesuatu (hal). Ia bisa juga menempatkan dirinya pada tendensi menyangkal atau mempertanyakan, dalam konteks afirmasi ataupun negasi.

Demikian buku ini, memberanikan hadir dengan hasrat menggebu-gebu ditimpali idealisme tinggi, mengangkat tema yang barangkali terlalu bombastis Dinamika dan Rekonstruksi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah. Karenanya, boleh jadi kontennya belum mampu menangkap apalagi menjawab ekspektasi para pembaca. Pemerintah telah memutuskan bahwa pada akhir tahun 2023, tenaga honorer dihapuskan termasuk tenaga guru honorer. Pada tahun 2020, penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih didominasi oleh pembayaran untuk guru honorer. Kondisi rasio siswa-guru akan rendah apabila hanya mengandalkan guru PNS. Hal yang menjadi perlu perhatian berdasarkan analisis regresi, rasio siswa-guru yang rendah akan berdampak pada kualitas pendidikan yang rendah pula. Untuk itu, kebijakan penghapusan guru honorer perlu dilakukan secara hati-hati terutama bagi daerah yang berdasarkan analisis kuadran memiliki jumlah guru sedikit dan berkualitas pendidikan rendah. Penghapusan guru honorer dapat dilakukan selama rasio siswa-guru dapat dipertahankan melalui penambahan jumlah guru ASN (PNS dan PPPK). Buku Platform Perikanan Nasional untuk Mencapai SDGs 14 ini memuat urgensi, tantangan, dan rekomendasi untuk mendukung pencapaian Tujuan 14 - Ekosistem Lautan yang sejalan dengan target pembangunan kelautan dan perikanan nasional. Buku ini berusaha mengelaborasi masalah-masalah yang muncul di permukaan yang merupakan gejala (symptoms) dari akar masalah sesungguhnya (root cause) yang menghambat optimalisasi potensi kelautan dan perikanan Indonesia secara berkelanjutan. Sesuai dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadikan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional, maka dirasa penting mengenalkan berbagai istilah perikanan dan kelautan bagi generasi muda bangsa Indonesia. Buku Ensiklopedia kelautan dan Perikanan disusun sesederhana mungkin, agar mudah dipahami sehingga membantu generasi muda yang ingin belajar tentang ilmu yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan.

ZEE merupakan perkembangan hukum internasional dalam rangka mengatur kelautan yang berkaitan dengan pemanfaatan ekonomis sumber daya hayati khususnya sumber daya ikan bagi kemakmuran rakyat negara pantai dan kepentingan negara lain yang terkait, dengan tetap memerhatikan faktor pelestarian dan keberlanjutannya. Indonesia tergolong sebagai

negara maritim terbesar di dunia karena memiliki laut yang luas sehingga Indonesia dikenal dunia sebagai negara maritim yang memiliki potensi besar di bidang kelautan, khususnya di ZEE-nya yang luasnya mencapai 2,7 km². Pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, mengharuskan Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan, tanpa mengesampingkan kepentingan negara lain. Hal ini menyebabkan Indonesia harus segera berbenah dan menyelaraskan aturan-aturan terkait. Buku ini mencoba menganalisis hak, kewajiban, dan kewenangan yang dimiliki oleh Indonesia terkait dengan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia bagi kesejahteraan rakyatnya, dan pemanfaatan surplus oleh negara lain. Selanjutnya, kasus-kasus yang disajikan dalam buku ini diyakini dapat terjadi kembali dalam bentuk yang berbeda sehingga perlu dipersiapkan langkah-langkah preventif. Wisata bahari merupakan salah satu potensi Indonesia yang layak untuk dikembangkan sebab sebagai negara kepulauan (archipelagic state), Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan biota perairan. Bertolak belakang dengan potensi alam bahari di Indonesia, untuk saat ini referensi terkait wisata bahari masih minim ditemukan. Kondisi ini mendorong penulis untuk menyusun buku dengan judul “ Pengantar Wisata Bahari ” . Substansi buku ini diambil dari buku, artikel, dan sumber-sumber lain sebagai referensi, juga diperkaya dengan pengalaman penulis dalam melaksanakan penelitian pariwisata khususnya wisata bahari. Buku ini berisi materi dengan kemutakhiran informasi penelitian dan pengabdian masyarakat, serta memberikan gambaran kondisi pengembangan wisata bahari di Indonesia secara nyata dituangkan sebagai pembandingan dengan teori dan konsep yang telah ada. Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa jurusan pariwisata setingkat sarjana atau strata yang lebih tinggi. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi bagi para akademisi/praktisi, dosen, peneliti, dan siapa pun yang berminat terhadap kajian wisata bahari dengan harapan dapat menjadi tambahan referensi bagi buku dengan tema sejenis. Buku “ Pengembangan Perikanan, Kelautan dan Maritim untuk Kesejahteraan Rakyat ” merupakan hasil pemikiran dan gagasan dari para Guru Besar Institut Pertanian Bogor. Terdapat 39 artikel hasil penelitian, pemikiran dan pengalaman ilmiah yang terkumpul. Oleh karena itu, buku ini diterbitkan menjadi dua volume. Volume 1 memuat pemikiran dan gagasan yang mencakup: Arah pengembangan perikanan, kelautan dan maritim; Karakteristik ekosistem pesisir dan laut; Aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat pesisir; serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) kelautan. Tulisan-tulisan Guru Besar IPB pada buku ini diharapkan dapat menjadi sumbang karya pemikiran bagi para pembaca, khususnya pemerintah dan pengambil keputusan serta pihak terkait yang bertanggung jawab mengelola kebaharian nusantara. Kondisi masyarakat nelayan masih berada pada tingkat kesejahteraan yang masih rendah atau tergolong miskin. Kemiskinan tersebut merupakan permasalahan dari ketidakberdayaan mereka dalam melaksanakan aktivitas ekonomi maupun aktivitas sosial mereka sebagai masyarakat nelayan. Diduga ketidakberdayaan tersebut ditentukan oleh faktor-faktor pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang mereka miliki masih belum memiliki kapasitas yang dapat menjadikan mereka berdaya sebagai masyarakat nelayan yang sejahtera. Dengan demikian pemberdayaan merupakan konsep yang berhubungan dengan kemandirian individu dan juga masyarakat dalam pengertian terjadinya proses perubahan dari ketergantungan kepada kemandirian. Kemandirian individu atau masyarakat merupakan refleksi dari potensi yang dimiliki dalam hal pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang mereka miliki. Buku ini akan membahas mengenai: (1) faktor-faktor penyebab kemiskinan nelayan; (2) kebijakan

pemerintah terkait pembiayaan dan faktor-faktor penyebab belum efektifnya pelaksanaan kebijakan pembiayaan tersebut; dan (3) iv arah dan kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan nelayan. Buku ini terdiri dari 12 artikel ilmiah yang terbagi dalam 5 subtopik, yaitu Teknologi Pengembangan Perikanan Tangkap, Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Bioteknologi Pengembangan Budidaya Perairan, Bioteknologi Pengembangan Hasil Perikanan, dan Teknologi Pengembangan Kelautan. Buku ini mengajak kita merenungkan kembali perlunya untuk mengikis batas pembeda antara yang kita anggap sebagai "Indonesia Barat" dan "Indonesia Timur" dalam upaya membangun kesejahteraan Indonesia. Meskipun upaya tersebut telah dilakukan jauh semenjak dahulu sampai era reformasi hadir, tampaknya kesenjangan antara barat dan timur masih cukup nampak. Di samping perlunya pembangunan ekonomi yang merata dan adil, buku ini mencoba mewacanakan kembali mengenai model pembangunan Indonesia Timur yang menekankan partisipasi masyarakat, pelibatan aspek sosial budaya serta peka terhadap isu lingkungan. Pendekatan sosial budaya dan antropologis tampaknya menjadi penting jika mengingat masyarakat Indonesia Timur penuh dengan kekayaan budaya dan karakter sosial spesifik yang dapat menjadi modal bagi pembangunan Research on marine resources and fisheries in Indonesia. ' Buku ini memuat laporan oleh Asia Competitiveness Institute (ACI) yang diperbaharui setiap tahunnya untuk menganalisis daya saing Indonesia, baik di 33 provinsi maupun di enam wilayah berdasarkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dengan 104 indikator yang meliputi empat lingkup, metodologi studi yang unik menggabungkan kekuatan dan kelemahan komparatif serta menerapkan analisis kausalitas Geweke untuk beberapa indikator terkait. Terlepas dari hasil skor dan peringkat, simulasi kebijakan "what if" menawarkan rekomendasi praktis bagi masing-masing provinsi untuk meningkatkan daya saing secara komprehensif serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berimbang, adil, dan berkelanjutan. Analisis kualitatif dan kuantitatif melalui proses kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan memberikan alur yang menarik bagi Indonesia untuk mencapai posisi paling strategis baik dalam konteks regional Asia maupun global. The English version of the book can be found at: 2014 Provincial and Inaugural Regional Competitiveness Analysis: Safeguarding Indonesia's Growth Momentum. Contents: Analisis Peringkat Daya Saing dan Studi Simulasi untuk 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2014 Peringkat Daya Saing Wilayah dan Strategi Pembangunan untuk Indonesia Tahun 2014: Perspektif Kebijakan Kewilayahan Analisis Daya Saing Wilayah Sumatera Analisis Daya Saing Wilayah Jawa Analisis Daya Saing Wilayah Kalimantan Analisis Daya Saing Wilayah Sulawesi Analisis Daya Saing Wilayah Bali-Nusa Tenggara Analisis Daya Saing Wilayah Maluku-Papua Analisis Geweke dalam Hubungan Kausalitas untuk Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur Kata Penutup dan Agenda Penelitian Berikutnya Lampiran 1: Daftar Indikator Lampiran 2: Penghitungan Peringkat: Algoritma Lampiran 3: Catatan Agregasi Data Dari Tingkat Provinsi ke Tingkat Wilayah Readership: Scholars and researchers studying ASEAN economics, in particular Indonesia's. Keywords: Indonesia; Bahasa; Momentum; Provincial; Analysis' Kedaulatan (sovereignty) dan hak berdaulat (sovereignty right) negara atas laut merupakan hak negara untuk melakukan pengaturan, pengawasan, perlindungan, dan pengolahan atas laut guna melindungi kepentingan nasional di laut. Hingga saat ini, kurang lebih 35 peraturan perundang-undangan berkaitan dengan bidang maritim telah ditetapkan pemerintah, dan masing-masing memiliki keterkaitan dengan sektor kelautan. Orientasi peraturan perundang-undangan tersebut tampaknya tumpang tindih, bersifat parsial dan lebih banyak

mementingkan ego instansi sektoral. Buku ini merupakan Disertasi penulis saat menyelesaikan program doctoral di Universitas Indonesia dan atas berbagai kebijakan editing terbagi atas 7 Bagian. Menggugat Negara Maritim Konflik Kebijakan Di Wilayah Perbatasan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak Indonesia mempunyai sumber daya laut dan hutan berlimpah, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaannya pun kurang memperhatikan aspek keberlanjutan. Akibatnya, keberlanjutan SDA itu pun terancam, termasuk penyediaan kebutuhan hidup generasi mendatang. Melalui pengelolaan yang baik, SDA itu sebenarnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, masyarakat nelayan dan mereka yang bermukim di sekitar hutan, masih banyak terperangkap dalam kemiskinan akibat pemanfaatan SDA sering hanya mengedepankan aspek ekonomi semata, sementara aspek sosial dan ekologi kurang menjadi prioritas. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, ketiga aspek itu harus mendapat perhatian berimbang agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Buku ini mengungkap persoalan sekitar pengelolaan sumber daya laut dan hutan dari sisi perspektif, kebijakan, dan permasalahan pengelolaan sumber daya yang terjadi di beberapa daerah. Buku ini membahas berbagai aspek Iptek dalam mewujudkan visi membangun Indonesia menjadi Negara Maritim dan Poros Maritim Dunia sehingga dapat diimplementasikan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kemaritim adalah peradaban dunia karena kepentingan negaranegara di dunia sangat ditentukan bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan laut untuk kemakmuran maupun keberlanjutan bangsa-bangsa di dunia. Indonesia perlu meletakkan arah pembangunan sebagai Negara Maritim seperti yang telah dicapai nenek moyang bangsa Indonesia dalam abad keemasan sebagai negara maritim pada saat Kerajaan Mataram dan Sriwijaya serta kerajaan lainnya di Nusantara yang “ menguasai laut ” dari berbagai belahan bumi sehingga mendapatkan kemakmuran bagi rakyatnya dari laut melalui aktivitas ekonomi maupun perdagangan global dengan memanfaatkan laut. Zaman kejayaan maritim tersebut harus direbut kembali oleh bangsa Indonesia dengan mengintegrasikan pembangunan darat dan laut sebagai sebuah kekuatan pembangunan yang menyejahterakan bangsa Indonesia dan disegani bangsa-bangsa di dunia. Maraknya kasus lingkungan di Indonesia adalah sebagai akibat dari penerapan sanksi terhadap para pelaku pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup umumnya masih sangat ringan, sehingga efek jera yang diharapkan terhadap para pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan masih belum optimal. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup secara nasional dalam rangka perlindungan lingkungan hidup di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya berbagai instrumen hukum berupa regulasi antara lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup (UULH), yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), selanjutnya diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Buku ini dapat memperkaya referensi ilmiah di bidang hukum lingkungan, khususnya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap Mata Kuliah Hukum Lingkungan. Selain itu diharapkan pula bermanfaat bagi para praktisi hukum dan pelaku usaha pemegang izin lingkungan guna menambah pengetahuan teoretis dan praktis tentang hukum lingkungan di Indonesia. Fenomena dramatis antara potensi dan pemanfaatan sumber daya kelautan ini berbanding lurus dengan kehidupan masyarakat pesisir yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Nelayan adalah merupakan kelompok masyarakat miskin.

Lingkungan pemukiman yang padat, kumuh, terpolusi, pendapatan yang rendah, serta memiliki kerentanan yang tinggi adalah gambaran yang umumnya melekat pada nelayan tradisional di Indonesia. Keadaan tersebut hampir terjadi di semua lapisan masyarakat pesisir yang ada di Indonesia, tidak terkecuali masyarakat pesisir yang ada di pantai timur Sumatera Utara, termasuk di dalamnya masyarakat pesisir yang ada di Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Buku ini membahas tentang proses penguatan tata kelola terumbu karang secara praksis dan empiris di Indonesia. Buku ini berusaha memuat semua aspek yang terkait dengan tata kelola terumbu karang. Kami mengundang 18 penulis dengan berbagai latar belakang keilmuan maupun institusi untuk berkontribusi dalam penulisan buku ini. Manajemen agribisnis perikanan merupakan serangkaian proses penerapan manajemen pada bisnis perikanan mulai dari hulu sampai hilir agar alokasi segala sumberdaya dapat efektif dan efisien untuk menghasilkan profit yang berkelanjutan. Dalam buku ini dibahas secara detail mengenai ilmu manajemen agribisnis yang diterapkan pada bisnis perikanan mulai dari definisi, bentuk badan usaha yang sesuai dengan skala usaha, dasar-dasar teori ekonomi yang perlu diketahui sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang disertai dengan pengaplikasian berbagai manajemen pada agribisnis perikanan meliputi manajemen produksi agribisnis, manajemen pemasaran agribisnis, manajemen resiko agribisnis dan manajemen teknologi agribisnis. Pembiayaan usaha dalam agribisnis perikanan juga perlu diperhatikan secara cermat sehingga keuntungan bisa tercapai secara optimum. Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang juga mendukung konsep agribisnis perikanan diwujudkan dalam melalui program minapolitan. Minapolitan merupakan upaya percepatan pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga diharapkan dapat memberikan multiplier effect tinggi terhadap perekonomian di daerah sekitarnya. Pengembangan kebijakan minapolitan akan menjadi basis industrialisasi Kelautan dan Perikanan yang dilandaskan pada konsep blue economy. Kami berharap bahwa berbagai temuan hasil riset yang disajikan dalam buku ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai penelitian di masa yang akan datang. Adapun hasil-hasil penelitian yang telah siap diimplementasikan, baik dalam dunia industri, rumah tangga, ataupun dalam perumusan kebijakan publik, kami harapkan dapat menyumbangkan nilai maslahat yang besar bagi masyarakat luas. Dalam konteks ini, kami sangat mendorong komunikasi dan kerja sama yang nyata antara para akademisi, pelaku bisnis, dan penyusun kebijakan publik yang dikenal sebagai segi tiga ABG (academicia, business, and government). Tanpa komunikasi dan kerja sama yang baik di antara tiga kelompok pelaku tersebut mustahil dihasilkan nilai tambah yang bermanfaat besar bagi masyarakat luas. Buku ini menganalisis hal-hal mendasar dimulai dari perbedaan antara masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional, adanya inkonsistensi penggunaan terma, dianutnya weak legal pluralism dalam sistem hukum nasional. Tulisan ini juga mengulas tidak optimumnya perlindungan terhadap masyarakat tradisional dan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang kurang beruntung (lemah) berdasarkan telaah keadilan Amartya Sen yang berada dalam naungan paradigma konstruktivisme. Menyibak Gelombang Menuju Negara Maritim berisikan analisis strategis dan bahasan komprehensif tentang pembangunan maritim di semua sektor. Indonesia sebagai pusat gravitasi geopolitik dan geoekonomi kawasan Asia Pasifik, merupakan posisi yang sangat strategis bagi masa depan keamanan nasional maupun regional. Munculnya isu geopolitik baru berupa perebutan ruang (lebensraum) dan sumber daya alam di laut, harus semakin memperkuat Indonesia agar

mampu menguasai dan memanfaatkan laut untuk kesejahteraan. Artinya, hakikat kuasa laut (sea power) untuk mewujudkan negara maritim harus dapat terimplementasikan dalam pembangunan nasional secara konsisten dan berkelanjutan. Dibutuhkan peta-jalan (roadmap) strategi dalam suatu kebijakan kelautan, didukung kepemimpinan yang kuat guna menjalankan pilihan strategis politiknya. Keberhasilan penataan sistem konektivitas maritim menjadi faktor penentu, karena menyangkut penguatan pembangunan integratif, meliputi: penciptaan pemerataan pertumbuhan wilayah, hard infrastructure, soft infrastructure, dan budaya maritim. Maka, untuk menjadi negara maritim, seluruh sektor maritim harus diberdayakan secara optimal, termasuk upaya meniadakan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Diperlukan kerja keras berkesinambungan dengan menerapkan solusi strategis yang efektif guna mewujudkan poros maritim dunia. Terbitnya buku ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pembuatan skripsi, tesis, maupun disertasi bagi para mahasiswa tingkat akhir jurusan teknik sipil, teknik ingkungan, kelautan dan perikanan, dosen, peneliti, serta pihak-pihak terkait lainnya, seperti pengusaha di bidang kemaritiman, kementerian kemaritiman, kelautan dan perikanan, serta energi sumber daya dan mineral dalam membuat keputusan maupun kebijakan. Manajemen bencana merupakan bidang kajian yang mengalami perkembangan sangat cepat dalam dasawarsa terakhir. Salah satu studi tentang kebencanaan, yaitu dengan menggunakan pendekatan positivism. Pendekatan positivism terkait erat dengan tema tentang sosial budaya dan kemasyarakatan. Hal tersebut terutama dalam kaitannya dengan pola dan respons masyarakat terhadap situasi bencana yang mengancamnya (adaptive capacity) serta kemampuan masyarakat dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian dan memberikan timbal baliknya dalam menghadapi fenomena-fenomena bencana. Buku ini berusaha memaparkan identifikasi kearifan lokal dari proses perilaku dan budaya masyarakat dalam kurun waktu yang panjang. Selain itu, buku ini juga berusaha menemu-kenali modal sosial yang ada di dalam masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan dan upaya pengurangan risiko bencana. Berbagai karakteristik fisik wilayah, kearifan, dan budaya lokal terkait dengan adaptasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pesisir dan ancaman bencana di wilayah pesisir diulas secara lebih jelas. Secara lebih teknis, buku ini akan memaparkan dan menyajikan data-data, baik berupa data statistik maupun data secara keruangan, dalam kaitannya untuk memberikan gambaran dan penjelasan dalam konteks dinamika pesisir. Pada beberapa bab dan bagian akan dipaparkan data terkait data-data kependudukan, data sosial, data geografi, data-data lingkungan, dan lain sebagainya dengan menggunakan studi kasus suatu daerah. Studi kasus kawasan pesisir Demak dipilih dalam penjelasan dan pemaparan ini. Data kependudukan, data sosial, data potensi wilayah dalam lingkup wilayah pesisir Demak dipaparkan dengan menggunakan tabel, peraga diagram, peta, dan lain sebagainya. Selanjutnya, buku ini memaparkan contoh-contoh empiris hasil analisis secara terintegrasi dari modal sosial yang ada dalam masyarakat dalam kaitannya dengan pemanfaatan kapital tersebut untuk pembangunan berkelanjutan. Urgensi dari penulisan buku ini adalah memberikan berbagai informasi dan data kepada pemerintah daerah yang terkait dengan kearifan lokal dan modal sosial masyarakat tradisional untuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, penulisan buku ini juga penting untuk pengembangan metode dalam riset-riset multidisiplin yang terintegrasi. Diharapkan pada akhirnya buku ini dapat memberikan tambahan referensi, pemahaman, dan pengetahuan kepada para mahasiswa, baik mahasiswa S-1, S-2, maupun S-3 yang akan melaksanakan penelitiannya. [UGM Press, UGM, Gadjah Mada University Press] Buku berjudul Ekonomi Pembangunan Pertanian disusun berdasarkan

beberapa gagasan penulis yang terserak di berbagai forum akademis dan kebijakan pembangunan pertanian Indonesia. Sistematika pembahasan menggunakan logika akademis objektif. Sistematika meliputi tujuan kebijakan, instrumen, kinerja, dan implikasi kebijakan, serta turunannya terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Terkandung implisit di dalam buku bahwa pengembangan sumber daya manusia, inovasi, perubahan teknologi, penguatan birokrasi, dan modal sosial menjadi faktor vital dalam keberhasilan pembangunan pertanian. Segenap unsur harus sering berjumpa, berdialog, dan mencari pemahaman apabila titik temu masih sulit diperoleh. Sekali lagi, diskusi terbuka adalah salah satu cara beradab untuk belajar saling menghargai pendapat semua pihak. Baik yang mendukung, yang netral, maupun yang menentang kebijakan pembangunan pertanian. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Visi Indonesia bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memiliki tugas untuk mewujudkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (periode ke-II tahun 2019-2024) dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadim Anwar Makarim sebagai nahkoda Kemendikbud telah mengeluarkan dan menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan nasional yaitu "Merdeka Belajar". Program tersebut meliputi (1) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) diselenggarakan di Sekolah dengan bentuk tes untuk uji kompetensi dan portofolio, (2) Ujian Nasional (UN) diubah menjadi Asesment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, tes diselenggarakan untuk kelas 4, 8, dan kelas 11, (3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang hanya terdiri dari komponen inti yaitu (a) Tujuan Pembelajaran; (b) Kegiatan pembelajaran; dan (c) Asesment, dan kebijakan yang ke (4) terkait Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi Kemendikbud tetap menggunakan Sistem Zonasi dengan adaptasi yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas diberbagai daerah. Daerah diberikan kewenangan dalam menentukan proporsi dan menetapkan wilayah zonasi. Adapun komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, jalur perpindahan maksimal 5 persen, selebihnya jalur prestasi 0-30 persen. Mendikbud Nadim Makarim berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam mengimplementasikan empat program kebijakan pendidikan nasional melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Problemnya bagaimana Merdeka Belajar diterjemahkan dalam proses belajar mengajar? Ini belum ada semacam koridor baku yang merdeka. Kemudian jika praktik Merdeka Belajar dalam proses belajar mengajar tersebut memerlukan kualifikasi tertentu yang harus dimiliki guru, lalu guru seperti apa yang diharapkan mampu menerjemahkan Merdeka Belajar? Untuk menghadirkan guru yang berkualitas agar mampu menghadirkan Merdeka Belajar dan mampu menyiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan yang penuh ketidakpastian itu seperti apa? Di sisi lain kita semua menyadari bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang begitu luas dan sangat bervariasi dari sisi keberadaan guru, baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga sangat sulit kita untuk menerapkan 8 standar nasional pendidikan yang seharusnya dicapai oleh semua jenjang dan satuan pendidikan di semua provinsi dan kabupaten kota. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap universitas yang menyiapkan guru-guru masa depan? Model Pendidikan untuk guru yang mampu menghadapi masa depan dengan konsep merdeka belajar itu seperti apa? Poin penting yang disajikan dalam buku ini terangkum dalam 7 (tujuh) bagian: Bab "Pendahuluan": Kondisi wilayah pesisir Indonesia, Konsep kebijakan publik pesisir, Implementasi kebijakan daerah pesisir dan pengelolaan wilayah pesisir (PWP),

dan Pembangunan berkelanjutan PWP; Bab “ Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir ” ; Bab “ Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir ” ; Bab “ Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu: Pemanfaatan Ruang, Sumber Daya, dan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir ” ; Bab “ Desentralisasi dan Partisipasi dalam Pengelolaan Pesisir Terpadu: Pelajaran Kebijakan dari Brasil dan Indonesia ” ; Bab “ Mengkritisi Kebijakan Wilayah Pesisir ” ; dan “ Metodologi Penelitian Wilayah Pesisir ” . Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup Provinsi Maluku adalah cermin kecil Negara Indonesia, di mana luas lautan wilayah ini lebih luas dari wilayah daratannya. Diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan/maritim (archipelagic state/archipelago) terbesar di dunia. Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Provinsi Maluku merupakan salah satu wilayah kepulauan dengan lautan terluas di Indonesia. Untuk itu pengembangan wilayah seperti ini diperlukan strategi yang tepat seperti konsep/kebijakan yang bertujuan mewujudkan saling ketergantungan antarwilayah serta keseimbangan antara pusat (core region) dengan wilayah lainnya. Salah satu strategi adalah pembangunan perekonomian wilayah berbasis kepulauan. Roda perekonomian suatu wilayah digerakkan oleh sektor-sektor unggulan. Kemampuan suatu sektor menjadi penggerak utama bagi sektor-sektor lainnya dan memacu pembangunan ekonomi menjadikannya sebagai sektor unggulan atau disebut sebagai leading sector atau key sector. Dengan demikian, sektor unggulan adalah suatu sektor yang paling efektif untuk berperan sebagai engine of development dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan, yang mengacu pada kemampuan sektor tersebut untuk mendorong, menunjang kegiatan produksi dan menopang pertumbuhan serta perkembangan seluruh sektor dalam perekonomian. Sektor unggulan juga tidak hanya memiliki peran dalam artian berupa kontribusi yang sifatnya langsung terhadap pembangunan perekonomian. Hal ini dilihat dari keterkaitan sektor unggulan terhadap sektor lain. Menurut Arsyad (1992), keterkaitan antarsektor itu merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh growth pole, yakni sektor yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi. Growth pole tersebut tidak mengacu pada lokasi secara geografis, namun suatu sektor yang menyebar dalam berbagai saluran ekonomi sehingga mampu menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa ahli mengemukakan tentang pembentukan sektor kunci dengan menggunakan Analisis Input Output untuk melihat apakah suatu sektor dapat menjadi sektor kunci atau tidak, Chenery dan Watanabe (1958) dalam Daryanto (1995) menyatakan bahwa tingginya keterkaitan ke depan dan ke belakang dapat terlihat pada tingginya suatu nilai di atas harga rata-ratanya. Sedangkan rendahnya keterkaitan ke depan dan ke belakang diperlihatkan oleh rendahnya suatu nilai di bawah harga rata-ratanya. Sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang yang tinggi.